



Judul : Warning Komisi VII, Awas, tata kelola minerba jadi rusak
Tanggal : Jumat, 02 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Warning Komisi VII

Awas, Tata Kelola Minerba Jadi Rusak

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto menyoroti sikap sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang.

Diketahui, ormas Persatuan Islam (Persis) ingin ikut mengelola tambang, sebagaimana halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Mulyanto mendapat informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini juga tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini. Diingat, ormas-ormas keagamaan ini belajar dari kisah Perang Uhud yang ditulis dalam ayat suci Al Quran.

"Kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghanimah (harta pampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya

umat tidak terurus," jelas Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Politisi PKS ini pun khawatir bakal munculnya fenomena yang berpotensi merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat. Karena itu, dia minta Pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Dia melihat potensi kerawanan sosial yang bakal terjadi imbas dari dilebolehkannya ormas mengelola tambang minerba. Kondisi ini bakal menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang.

"Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good go-*

vernance) menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat yang mengurus ekonomi dengan sektor ketiga yang mengurus masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih, memicu kekacauan," terangnya.

Mulyanto mengatakan, Undang-Undang Minerba sudah jelas mengamankan bahwa pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Sebab, masalah pengusahaan dan pengelolaan tambang ini adalah masalah pengusahaan yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.

Dia pun menilai, kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini berpotensi besar melanggar Undang-Undang Minerba

lantaran memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan. Padahal amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Karena itu, dia menyarankan Pemerintah sebaiknya membatalkan aturan pemberian konsesi tambang ini. Mengingat umur Pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi. Dia minta di detik-detik akhir kekuasaan, Pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

Dia juga bespesan agar pengelolaan izin tambang oleh ormas keagamaan dilakukan secara hati-hati.

"Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir. Jadi tidak perlu grasa-grusu," tambahnya. ■ KAL